



**RENCANA STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA**  
**PROBOLINGGO**  
**2025-2026**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 disusun sesuai tupoksi sekretariat DPRD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026, yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ini diharapkan mampu menjabarkan arahan RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2026 ke dalam rencana instansional, menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja, menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan serta menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktifitas dan menjamin efektifitas penggunaan daya organisasi.

Sehubungan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis dalam pembangunan Kota Probolinggo, maka diperlukan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026.

Akhirnya dengan menyadari segala keterbatasan yang ada, semoga RENSTRA ini bermanfaat sebagai acuan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Probolinggo, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA ROBOLINGGO

  
**Drs. TEGUH BAGUS. S. M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660605 199003 1 015

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi .....	ii	
Bab I	Pendahuluan .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
	1.4 Sistematika Penulisan .....	7
Bab II	Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD .....	8
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .....	8
	2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD .....	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	14
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD .....	17
Bab III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD .....	18
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD .....	18
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	21
	3.3 Penentuan Isu-isu Strategis .....	25
Bab IV	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	26
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan .....	29
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	30
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	43
Bab VIII	Penutup .....	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 ialah adanya kekosongan jabatan kepala daerah. Masa jabatan Walikota Probolinggo yang terpilih pada periode 2019-2024 yang berakhir pada akhir tahun 2023. Dengan adanya kekosongan kepala daerah di Kota Probolinggo pada tahun 2024-2025 maka sesuai dengan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Inmendagri 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah daerah, sehingga daerah yang periode RPJMD-nya telah berakhir dapat merencanakan pembangunan untuk tahun 2025 hingga 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Menghadapi ketidak tersediaan platform politik dalam dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sebagai panduan pembangunan, RPD tersebut mengacu pada Rancangan Awal RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045. RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 terdiri dari empat periode perencanaan jangka menengah, yang mana RPD Tahun 2025-2026 hanya merupakan irisan periode pertama RPJPD Kota Probolinggo pada periode 2025-2029. Oleh karena itu, RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 menjadi tahap pembuka dari perencanaan jangka panjang daerah. Pendekatan utama dalam RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 adalah pendekatan teknokratis. Setidaknya, RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan 1) Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2025-2029; 2) Kesesuaian Visi, Misi, dan sasaran pokok dan arah kebijakan Rancangan Awal RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045; 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024; 4) RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026; 5) Kebijakan Nasional; dan 6) Regulasi lain yang berlaku dalam penyusunan dokumen ini. 2 Berbagai poin yang menjadi dasar penyusunan RPD tersebut sangat penting. Penyusunan dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 mengikuti tahapan yang dijelaskan dalam Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024,

termasuk tahap Forum Konsultasi Publik yang akan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan arahan Inmendagri 3 Tahun 2023. Dengan terbitnya dokumen RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026, dokumen tersebut akan menjadi panduan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 hingga tahun 2026. Sehingga Perangkat daerah diwajibkan untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara langsung, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026 juga harus mengacu pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 ,

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 adalah :

### **a. Landasan Operasional :**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan DOKumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
24. .Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota 5 Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 9);
27. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas peraturan Walikota Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis 2025 – 2026 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ini adalah :

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Probolinggo
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Sekretariat DPRD Daerah Kota Probolinggo tahun 2025 – 2026 Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 adalah :
  1. Sebagai pedoman Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan guna mewujudkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik.
  2. Menjadi instrumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.
  3. Menjadi tolok ukur meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public pemerintahan khususnya Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2005 - 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika

### **Bab II : Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD**

- 2.1 Tugas, Fungsi , Struktur PD;
- 2.2 Sumber Daya PD;
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD;
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

### **Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Capaian Kinerja PD
- 3.2 Isu Strategis;

### **Bab IV : Tujuan dan Sasaran DPRD Kota Probolinggo;**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD
- 4.2 Cascading Kinerja PD ( Tujuan, sasaran, Outcome, Output serta Indikator )

### **Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

### **Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

### **Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

### **Bab VIII : Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Sekretariat DPRD Kota Probolinggo yang mempunyai jumlah pegawai sebanyak 56 orang yang terdiri dari; ASN sebanyak 34 orang , PPPK 1 orang dan Non ASN sebanyak 21 orang. Sekretariat DPRD Kota Probolinggo merupakan Perangkat Daerah dengan type C melayani Anggota Dewan sebanyak 30 orang, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bagian Umum**, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor dan kehumasan;
  - b. penyiapan data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan proses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - d. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja di lingkup Sekretariat DPRD;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan serta rumah tangga, protokol dan kehumasan;
  - f. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
  - g. pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
  - h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- i. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub-Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Protokol;
  - b. membagi tugas dan memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur kerja Sekretariat DPRD;
  - d. melaksanakan urusan surat-menyurat yang diperlukan oleh DPRD;
  - e. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian dilingkup Sekretariat DPRD;
  - f. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai di lingkup Sekretariat DPRD;
  - g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - h. melaksanakan kegiatan tata kearsipan;
  - i. rencana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
  - j. memandu kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - k. menyiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan DPRD;
  - l. menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan-bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD;
  - m. menyiapkan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers dan menyiapkan bahan kerja sama timbal balik dengan pers dan instansi terkait;
  - n. melaksanakan pengelolaan, penyajian dan pelayanan informasi;
  - o. menyediakan pelayanan informasi melalui website DPRD/Sekretariat DPRD;
  - p. mengoordinasikan pelaksanaan keprotokolan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - q. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Protokol; dan
  - r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan di bagian perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan anggaran;
  - b. pengolahan program dan rencana anggaran kegiatan Sekretariat DPRD;
  - c. perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - d. pengelolaan administrasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan Sekretariat DPRD;
  - e. pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya di Lingkungan Sekretariat DPRD;
  - f. pelaksanaan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pengelolaan keuangan;
  - g. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;
  - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
3. Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah . Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang pembentukan peraturan daerah, rapat, risalah, penganggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan verifikasi penyusunan Naskah Akademik;
  - b. pengoordinasian bahan analisis produk penyusunan Peraturan Daerah;
  - c. pelaksanaan verifikasi bahan penyiapan Draft Peraturan Daerah Inisiatif;
  - d. pelaksanaan verifikasi bahan pembahasan Peraturan Daerah;
  - e. pelaksanaan verifikasi risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
  - f. pelaksanaan verifikasi data atau bahan dukungan jaringan aspirasi;
  - g. pengevaluasian rumusan dalam rangka pengawasan;
  - h. pengevaluasian bahan Daftar Inventaris Masalah (DIM);
  - i. pengoordinasian program dan jadwal rapat dan sidang;
  - j. pengoordinasian pembahasan KUA PPAS dan APBD/APBDP;
  - k. pengoordinasian pembahasan Peraturan Daerah pertanggungjawaban keuangan;
  - l. pelaksanaan evaluasi rumusan dapat dalam rangka pengawasan;
  - m. pelaksanaan evaluasi bahan rapat internal DPRD;
  - n. pelaksanaan verifikasi bahan dalam penegakkan kode etik DPRD;
  - o. pelaksanaan verifikasi bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - p. pengevaluasian bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - q. pengoordinasian kegiatan hearing atau dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
  - r. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - s. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Probolinggo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel II.1  
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretaris DPRD	1
2	Bagian Umum	9
3	Bagian Perencanaan dan Keuangan	7
4	Bagian Perundang-undangan, Rapat dan	8
5	Kelompok Jabatan Fungsional	8
6	PPPK	1
7	Non ASN	20
Jumlah		54

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol (Desember 2023)

Tabel II.2  
Komposisi Pangkat/Golongan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I A	0
	Golongan I B	0
	Golongan I C	0
	Golongan I D	0
	Golongan I :	<b>0</b>
2	Golongan II A	0
	Golongan II B	2
	Golongan II C	1
	Golongan II D	14
	Golongan II :	<b>17</b>
3	Golongan III A	6
	Golongan III B	0
	Golongan III C	2
	Golongan III D	3
	Golongan III :	<b>11</b>
4	Golongan IV A	2
	Golongan IV B	2
	Golongan IV C	1
	Golongan IV D	0
	Golongan IV E	0
	Golongan IV :	<b>5</b>
	Golongan VII (P3K)	<b>1</b>
Jumlah		<b>34</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol (Desember 2023)

Tabel II.3  
Komposisi Eselon Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Eselon II. B	1
2	Eselon III. A	3
3	Eselon IV. A	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol (Desember 2023)

Tabel II.4  
Komposisi Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	SD	3
2	SLTP	4
3	SLTA	19
4	D1	1
5	D3	3
6	S1	19
7	S2	8
8	S3	0
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol (Desember 2023)

Tabel II.5  
Komposisi Jenis Kelamin Pegawai Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretaris DPRD	1	-
2	Bagian Umum	6	3
3	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	1
4	Bagian Perundang-undangan, Rapat dan Risalah	6	3
5	Kelompok Jabatan Fungsional	4	3
6	PPPK	-	1
7	Tenaga Honorer	1	0
8	Pegawai Tidak Tetap	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>11</b>

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Protokol (Desember 2023)

Untuk Komposisi gender di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo lebih banyak laki-laki karena terkait dalam hal peningkatan pelayanan terhadap kegiatan DPRD Kota Probolinggo yang padat dan dibutuhkan ketangkasan dan kecepatan serta terkendala dengan padatnya jadwal kegiatan luar kota sehingga menjadi kendala bagi pegawai perempuan terkait ijin dan tugasnya sebagai istri serta sebagai ibu rumah tangga.

### 2.2.2 Asset/Modal

Tabel II.6  
Asset/Modal Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

No	Kode Barang	Pembidangan Barring	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	<b>01</b>	<b>Golongan Tanah</b>	<b>1</b>	<b>unit</b>	<b>2.290.500.000</b>
2	0101	Tanah	1	unit	2.290.500.000
3	<b>02</b>	<b>Golongan Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.896</b>	<b>Unit/Set</b>	<b>7.009.922.819</b>
4	0202	Alat-alat Besar	-	Unit/Set	199.485.000
5	0203	Alat – alat Angkutan	17	Unit	1.864.228.998
6	0204	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Unit	575.000
7	0205	Alat Pertanian	-	Unit	
8	0206	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.778	Unit	3.768.918.857
9	0207	Alat Studio dan Alat Komunikasi	90	Unit	1.171.201.500
10	0208	Alat – alat Kedokteran	9	Unit	5.513.464
11	0209	Alat Laboratorium	-	Unit	
12	0210	Alat – Alat Persenjataan/Keamanan	-	Unit	
13	<b>03</b>	<b>Golongan Gedung dan Bangunan</b>	<b>9</b>	<b>m2</b>	<b>6.615.261.934</b>
14	0311	Bangunan Gedung	9	m2	6.615261.934
15	0312	Monumen	-	m2	-
16	0313	Sarana Prasarana Taman dan Pemakaman	-	m2	-
17	<b>04</b>	<b>Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>9</b>	<b>Unit</b>	<b>221.786.000</b>
18	0413	Jalan dan Jembatan	-	Unit	-
19	0414	Bangunan Air dan Irigasi	-	Unit	221.786.000
20	0415	Instalasi	9	Unit	-
21	0416	Jaringan		Unit	-
22	<b>05</b>	<b>Golongan Asset Tetap Lainnya</b>	<b>679</b>	<b>Unit/Set/Ekor</b>	<b>109.703.500</b>
23	0517	Buku dan Perpustakaan	407	Unit/Set	95.328.500
24	0518	Barang Bercorak Kebudayaan	-	Unit/Set	-
25	0519	Hewan Ternak Serta Tanaman	272	Ekor/Unit	14.375.000
26	<b>06</b>	<b>Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>-</b>	<b>Unit</b>	<b>-</b>
27	<b>07</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>178.585.000</b>
<b>TOTAL :</b>					<b>16.425.759.253</b>

Sumber data : Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga (Desember 2023)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kota Probolinggo secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

**TABEL TC 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Survey Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD				70	71	72	73	74	77,39	77,37	73,18	78,53		111%	109%	102%	108%	0%

**TABEL TC 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Survey Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD	38.186.124.414	39.232.226.291	44.572.382.337	44.221.232.376	50.537.722.627	35.280.148.539	36.314.731.722	41.710.957.136	40.643.201.698		92%	93%	94%	92%	0%	89%	86%

## **2.4 Kelompok Sasaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya , kelompok sasaran Sekretariat DPRD Kota Probolinggo adalah Seluruh anggota DPRD Kota Probolinggo Periode 2019 – 2024 sebanyak 30 orang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap anggota DPRD Kota Probolinggo, Sekretariat DPRD Kota Probolinggo melaksanakan program kegiatan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  10. Layanan Administrasi DPRD
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  4. Peningkatan Kapasitas DPRD
  5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
  8. Fasilitasi Tugas DPRD

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO

#### 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

##### A. Faktor Internal

##### 1. Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
- c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

##### 2. Kelemahan :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- d. Layanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD masih kategori baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Hal ini tentunya akan memacu Sekretariat DPRD dalam melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan.

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Peluang :**

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

### **2. Ancaman/Tantangan :**

- a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

## **C. Pilihan Langkah Strategis**

### **Langkah Strategis S – O**

1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek dan tenaga ahli.
2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib dan kode etik DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

### **Langkah Strategis S - T**

1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;

2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.

#### **Langkah Strategis W - O**

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

#### **Langkah Strategis S – W**

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

#### **D. Faktor- faktor Kunci keberhasilan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2. Optimalikan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Optimalikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi RPD**

Berdasarkan Rancangan awal RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2045 maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo yang ingin diwujudkan adalah **“Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo Yang Inklusif Berdaya Saing dan Berkelanjutann “**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Probolinggo tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi yang terdiri atas :

- Misi 1** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan daya Saing Ekonomi Daerah
- Misi 2** Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter
- Misi 3** Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan kualitas Hidup Masyarakat
- Misi 4** Pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang terintegrasi dan Berkelanjutan
- Misi 5** Tata Kelola pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPD Kota Probolinggo 2025 – 2026 merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksana Misi Kelima yaitu : **“Tata Kelola pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”**

dengan tujuan **“Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima Berbasis Digital”** yang akan dilaksanakan melalui program – program Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sebagai berikut :

#### **Program Utama :**

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

#### **Program Penunjang :**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DA ERAHKABUPATEN/KOTA

Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, adalah Tabel III.1

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sesuai Visi Misi	Target 2025	Target 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	78,80	79

Berdasarkan uraian diatas, maka Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Terhadap Pencapaian Visi, Misi dapat dirumuskan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III.2  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo

**Visi : “Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo Yang Inklusif Berdaya Saing dan Berkelanjutan “**

**Misi : “Tata Kelola pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi**

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi 5 : Tata Kelola pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p>	<p>. Sisi layanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan kinerja DPRD masih dalam kategori “baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya” merupakan tantangan bagi PD agar terus berpacu dalam meningkatkan kinerjanya;</p> <p>. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum sepenuhnya optimal;</p> <p>. Pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;</p> <p>. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;</p> <p>. Sekretariat DPRD Kota</p>	<p>a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah</p> <p>b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD</p> <p>c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior</p> <p>d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD</p>	<p>a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD</p> <p>b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis</p> <p>c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat</p> <p>d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya</p> <p>e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</p>

		<p>Probolinggo tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Kota Probolinggo karena Sekretariat DPRD Kota Probolinggo hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD terhadap jumlah Peraturan Daerah bukan menjadi kewenangan Sekretraiat DPRD;</p> <p>f. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid.</p>		
--	--	--	--	--

### **3.3 Isu Strategis**

Pada bagian ini ditinjau kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo hanya ditinjau dari gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kota Probolinggo antara lain yaitu :

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
5. Padatnya kegiatan DPRD menuntut kesigapan sumber daya agar cepat, tepat dan tanggap terhadap kebutuhan yang ada sesuai dengan peran dan fungsi DPRD dalam merespon segala bentuk masalah dan keluhan dari masyarakat.
6. Dengan adanya tumpang tindih peraturan terkait dengan peran dan fungsi DPRD dalam menyusun raperda memerlukan koordinasi yang cepat terkait dengan isu nasional yang terkini.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

#### **1.1 Tujuan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

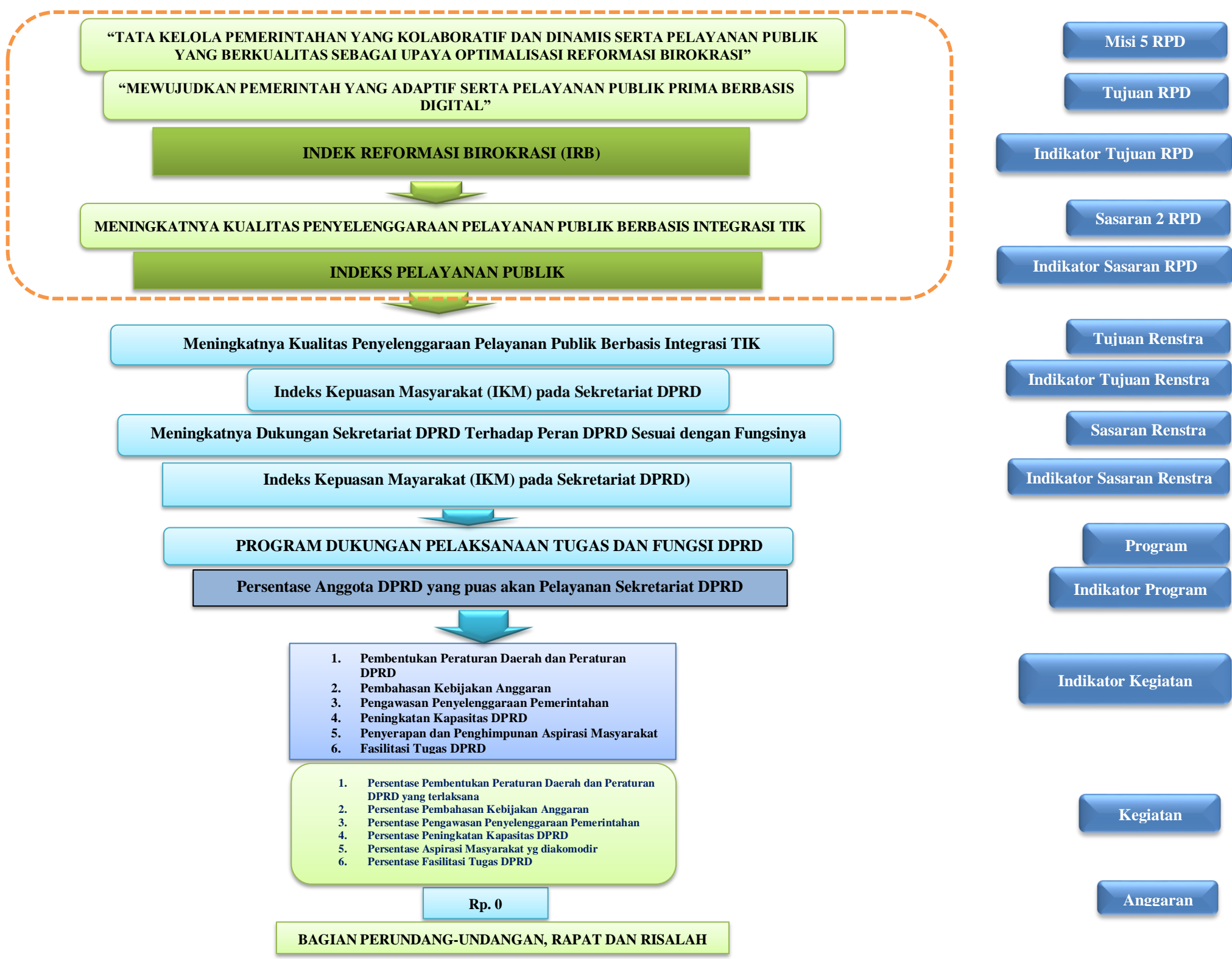
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi, maka Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 -2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

**“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Integrasi TIK”**

#### **1.2 Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

**“Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya”**



Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Probolinggo beserta Indikator Kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

**TABEL TC 25**

**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN	
				2025	2026
1	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Integrasi TIK</b>	<b>Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD</b>	<b>78,80</b>	<b>79</b>

Dari tabel di atas dirumuskan bahwa indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD dimana di akhir akan mencapai nilai indeks minimal 79

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis yang dapat dihasilkan di Sekretariat DPRD Kota Probolinggo yaitu, Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah dan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel TC 26**

#### **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang inklusif , berdaya saing dan berkelanjutan			
Misi : Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan public yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis integrasi TIK	Transparansi layanan publik dalam mewujudkan kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan dukungan penyelenggaraan kinerja Lembaga Legislatif

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### **Rencana Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Capaian pengukuran kinerja terhadap program yang sesuai dengan peran dan fungsinya tersebut digunakan untuk merencanakan target dan mengevaluasi realisasi capaian yang ingin diperoleh secara maksimal beserta pengendaliannya.

Adapun program-program dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

#### **Program Utama :**

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

#### **Program Pendukung :**

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

#### **Kegiatan**

Dari program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

#### **Program Utama :**

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
  - 1.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - 1.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - 1.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 1.4. Peningkatan Kapasitas DPRD
  - 1.5. Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - 1.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - 1.7. Pembahasan Kerjasama Daerah
  - 1.8. Fasilitasi Tugas DPRD

#### **Program Pendukung :**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- 1.10. Layanan Administrasi DPRD

#### **Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; Kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus objek pelaksanaan Strategi meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi. Sedangkan Pendanaan Indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel TC 27 berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
Mewujudkan pemerintahan yang adaptif, serta pelayanan public prima	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public berbasis integrasi	4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	73,18	78,8	27.923.780.909	79	28.963.415.611	79	28.963.915.611	Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	
		4.02.02.2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	100	1.706.266.000	100	1.845.000.000	100	1.845.000.000		
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	3	200.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000		
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10	13	1.100.000.000	13	1.200.000.000	13	1.200.000.000		
		4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	6	200.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000		
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	1	106.266.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
		4.02.02.2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas</b>	100	100	375.500.000	100	315.000.000	100	315.500.000		
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12	1	43.500.000	1	33.000.000	1	33.500.000		
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	19	1	87.000.000	1	67.000.000	1	67.000.000		
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBDPerubahan	19	1	95.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	57	1	65.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000		
		<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100</b>	<b>440.000.000</b>	<b>100</b>	<b>440.000.000</b>		
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	40	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		
		4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	48	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		
		4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	19	15	45.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000		
		<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi</b>	100	<b>100</b>	<b>3.037.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.294.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.294.000.000</b>		
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	180	180	2.500.000.000	180	2.700.000.000	180	2.700.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50	3	155.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000		
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	7	252.000.000	7	275.000.000	7	275.000.000		
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7	28	50.000.000	28	54.000.000	28	54.000.000		
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	7	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	35	75.000.000	40	85.000.000	40	85.000.000		
		<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	100	100	<b>1.130.000.000</b>	100	<b>1.230.000.000</b>	100	<b>1.230.000.000</b>		
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	30	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000		
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90	90	1.100.000.000	90	1.200.000.000	90	1.200.000.000		
		<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik sesuai ketentuan</b>	100	100	<b>6.000.000</b>	100	<b>4.000.000</b>	100	<b>4.000.000</b>		
		4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	5.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
		4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Tugas DPRD yang Difasilitasi</b>	100	100	<b>21.309.014.909</b>	100	<b>21.835.415.611</b>	100	<b>21.835.415.611</b>		
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	450	21.218.014.909	450	21.740.415.611	450	21.740.415.611		
		4.02.02.2.08.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
		4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	144	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	0	1	46.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
		<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	100	<b>100</b>	<b>21.267.000.000</b>	<b>100</b>	<b>22.860.000.000</b>	<b>100</b>	<b>22.860.000.000</b>		
		<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%</b>	100	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000</b>		
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6	45.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	8	6	55.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	100	100	4.310.000.000	100	4.803.000.000	100	4.803.000.000		
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	40	4.250.000.000	40	4.575.000.000	40	4.575.000.000		
		4.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1	55.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000		
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	5.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
		4.02.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	100	100	10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		
		4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	100	<b>100</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100</b>	<b>410.000.000</b>	<b>100</b>	<b>410.000.000</b>		
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37	2	35.000.000	2	160.000.000	2	160.000.000		
		4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	40	70.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000		
		<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	100	<b>100</b>	<b>433.651.000</b>	<b>100</b>	<b>493.651.000</b>	<b>100</b>	<b>493.651.000</b>		
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1	102.000.000	1	102.000.000	1	102.000.000		
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	6	32.651.000	6	32.651.000	6	32.651.000		
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000		
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
		4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
		4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
		<b>4.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	100	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100</b>	<b>155.000.000</b>		
		4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	3	5.000.000	0	0	0	0		
		4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000		
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	45	25.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000		
		<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi</b>	100	<b>100</b>	<b>551.349.000</b>	<b>100</b>	<b>591.349.000</b>	<b>100</b>	<b>591.349.000</b>		
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12	41.089.000	12	41.089.000	12	41.089.000		
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12	279.260.000	12	279.260.000	12	279.260.000		
		4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	12	71.000.000	12	111.000.000	12	111.000.000		
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12	160.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000		
		<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	100	<b>100</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100</b>	<b>360.000.000</b>	<b>100</b>	<b>360.000.000</b>		
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	18	105.000.000	18	105.000.000	18	105.000.000		
		4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	37	31.000.000	45	31.000.000	45	31.000.000		
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000		
		4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	163	54.000.000	163	54.000.000	163	54.000.000		
		<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi</b>	100	<b>100</b>	<b>15.310.000.000</b>	<b>100</b>	<b>15.845.000.000</b>	<b>100</b>	<b>15.845.000.000</b>		
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100	30	15.200.000.000	30	15.575.000.000	30	15.575.000.000		
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	29	150	75.000.000	150	225.000.000	150	225.000.000		
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	6	30	35.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran, Program, (outcome), kegiatan (output), dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan						Unit Kerja Perangkat	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah (2026)			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	100	57.000.000	100	57.000.000	100	57.000.000		
		4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000		
		4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	100	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000		
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD, dijelaskan bahwa indikator kinerja PD menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Sebagaimana RPD Tahun 2025 - 2026 Sekretariat DPRD Kota Probolinggo melaksanakan Misi ke 5 (lima) RPD yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif dan Dinamis serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi" dengan tujuan RPD "Mewujudkan Pemerintah yang Adaptif serta Pelayanan Publik Prima Berbasis Digital", dengan sasaran RPD "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan berbasis integrasi TIK".

Berdasarkan RPD diatas, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo merupakan aktualisasi penyelenggaraan pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kota Probolinggo melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPD.

Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo sebagaimana Tabel dibawah ini diharapkan akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

**Tabel TC 28**  
**INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
		2022	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	72	78,80	79	79

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **7.2 Kaidah Pembiayaan**

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 yang pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Probolinggo; dan
3. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan guna mendukung suksesnya Program RPD Kota Probolinggo.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kota Probolinggo ini dibuat untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 pada setiap tahunnya.